

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan disuatu negara tentunya akan dilakukan secara berkelanjutan. Pembangunan disuatu negara memiliki tujuan untuk meningkatkan daya saing dan mutu negara tersebut di mata negara-negara lainnya. Dalam suatu proses pembangunan wilayah akan mempengaruhi berbagai macam sektor dan mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh negara tersebut. Salah satu sumberdaya yang pasti ada didalam suatu negara adalah sumberdaya manusia, dimana pembangunan pada sumberdaya manusia juga dapat dianggap penting. Pembangunan pada sumberdaya manusia dapat dilakukan salah satunya dengan memperbaiki mutu Pendidikan yang ada di negara tersebut. Apabila, suatu negara memiliki mutu Pendidikan yang bagus maka akan dapat terwujud negara dengan harapan hidup tinggi. Hal tersebut dapat terjadi karena penduduk di negara tersebut berpenghasilan atau dapat dikatakan hidup layak.

Pendidikan di Indonesia erat kaitannya dengan Ki Hajar Dewantara sebagai bapak Pendidikan Indonesia. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah proses penyesuaian diri secara timbal balik antara manusia dengan alam, dengan sesuai manusia, atau juga pengembangan dan penyempurnaan secara teratur semua dari potensi. Menurut Ki Hajar Dewantara tujuan dari pendidikan Pendidikan yang akan menghasilkan manusia-manusia berjiwa Pancasila. Hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah seluruh daya upaya yang dikerahkan secara terpadu untuk tujuan memerdekakan aspek lahir dan balik manusia. dalam upaya mencapai tujuan-tujuan Pendidikan pastinya memerlukan berbagai aspek untuk menunjang hal tersebut, terutama pada aspek sarana dan prasarana terkait fasilitas yang dimiliki oleh suatu sekolah ataupun fasilitas terkait jenjang pendidikan yang dimiliki oleh suatu wilayah.

Fasilitas Pendidikan terkait satuan jenjang pendidikan di Indonesia tergolongkan atas satuan usia atau pendidikan tingkat anak usia dini, dasar,

menengah pertama, menengah atas dan kejuruan serta perguruan tinggi. Pada setiap satuan pendidikan tentunya memiliki standart masing-masing mulai untuk peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan pada tingkat satuan Pendidikan sekolah dasar diharuskan sudah memiliki usia 6 tahun dan sudah bisa membaca, pada satuan pendidikan sekolah dasar yang akan melanjutkan pendidikan pada satuan menengah pertama didasarkan pada hasil ujian nasional. Kemudian, untuk peserta didik pada tingkat satuan menengah pertama yang akan melanjutkan pendidikan pada satuan menengah atas ataupun kejuruan didasarkan pada hasil nilai ujian, begitu pula pada jenjang perguruan tinggi. Akan tetapi, pada satuan perguruan tinggi terdapat dua jalur untuk penerimaan mahasiswa baru yaitu jalur prestasi atau nilai raport dan prestasi non akademik serta jalur seleksi mandiri. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan jaman standart penerimaan siswa telah berubah menjadi sistem zonasi.

Sistem zonasi adalah salah satu produk yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia pada tahun 2017 yang kemudian disempurnakan pada tahun 2018. Perbelakuan sistem zonasi semakin diperkuat dengan adanya Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.51 Tahun 2018. Dalam pelaksanaan sistem zonasi tentunya banyak menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sistem zonasi ini erat kaitannya dengan penerimaan peserta didik berdasarkan domisili tinggal peserta didik. Sistem zonasi ini diklaim dapat memberi implikasi terhadap kesiapan seluruh sekolah dengan mutu yang setara dengan sekolah unggul atau sekolah favorit lainnya. Harapan Pemerintah dengan diberlakukannya sistem zonasi dapat mewujudkan sekolah negeri yang dapat memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan merata disuatu Kawasan tertentu.

Pelaksanaan sistem zonasi mengharuskan sekolah negeri untuk menerima paling sedikit 90% dari total peserta didik yang tinggal pada radius terdekat, 5% untuk alasan prestasi dan 5% alasan khusus seperti perpindahan orang tua. Sistem zonasi memiliki tujuan khusus yaitu sebagai berikut : 1) Menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara transparan, objektif, akuntabel

dan non diskriminatif. 2) Rotasi guru secara merata, dan 3) Menghilangkan sistem jual beli bangku. Akan tetapi, dalam perbelakuan sistem zonasi tentunya masih terdapat berbagai macam kekurangan – kekurangan lainnya, selain kekurangan dalam bentuk teknis pastinya terdapat perbedaan pada saat mengajar dikelas dengan penerimaan berdasarkan prestasi atau nilai dengan kelas dengan penerimaan didasarkan pada sistem zonasi secara kualitas pastinya akan berbeda.

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Serengan dengan mengambil tingkat satuan pendidikan dasar hingga menengah pertama yang terdapat pada wilayah administrasi tersebut. Topik mengenai sistem zonasi ini menjadi menarik untuk diangkat, karena wilayah administrasi Kecamatan Serengan hanya memiliki jumlah fasilitas sekolah dasar negeri 14 sekolah dan 2 sekolah menengah pertama. Keadaan tersebut menjadikan Kecamatan Serengan sebagai daerah dengan jumlah fasilitas pendidikan negeri terendah di Kota Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian sekunder yang menggunakan metode penelitian sensus karena jumlah populasi yang sedikit.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada latar belakang masalah di atas, maka permasalahan umum yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana agihan fasilitas pendidikan dasar hingga menengah pertama di Kecamatan Serengan tahun 2021?
2. Bagaimanakah keterkaitan antara agihan fasilitas pendidikan dasar hingga menengah pertama terhadap pelaksanaan sistem zonasi di Kecamatan Serengan tahun 2021?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Menganalisis agihan fasilitas pendidikan dasar hingga menengah pertama di Kecamatan Serengan tahun 2021.
2. Menganalisis keterkaitan antara agihan fasilitas pendidikan tingkat dasar hingga menengah pertama terhadap pelaksanaan sistem zonasi di Kecamatan Serengan tahun 2021.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini, ialah sebagai berikut :

1. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu geografi, khususnya ilmu geografi sosial dan geografi politik serta menjadi pertimbangan dalam perencanaan kebijakan dimasa yang akan datang.
2. Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran yang dapat bermanfaat bagi Kementrian Pendidikan selaku pencetus kebijakan zonasi.
3. Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran yang dapat bermanfaat bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surakarta serta Pemerintah Kota Surakarta.

### **1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya**

#### **1.5.1 Telaah Pustaka**

##### **A. Pendidikan**

Pendidikan merupakan pimpinan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa kepada anak-anak selama masa tumbuh kembangnya (secara jasmani maupun rohani) agar dapat berguna bagi dirinya dan masyarakat (Purwanto, 2014 : 10). Sebuah negara memiliki hak dan kewajiban secara absolut untuk menyelenggarakan dan menyediakan pendidikan serta pengajaran kepada warganya sesuai dengan prinsip dan tujuannya.

Tirtahardja (2008 :37) menjelaskan bahwa tujuan pendidikan meliputi penggambaran nilai-nilai kehidupan yang baik, luhur, pantas, benar dan indah. Oleh karena itu, tujuan pendidikan mempunyai dua fungsi yaitu sebagai pembimbing bagi semua aktivitas pendidikan dan tujuan yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. Proses pendidikan dilakukan melalui tahapan yang berkesinambungan (prosedural) dan sistematis karena dilaksanakan di semua lingkungan yang saling melengkapi (rumah, sekolah, dan masyarakat) dalam segala kondisi.

Penerapan pendidikan pada dasarnya yaitu untuk mendidik, mengajar serta membentuk manusia menjadi manusia seutuhnya. spasial atau analisis keruangan merupakan analisis yang mempelajari perbedaan lokasi mengenai sifat-sifat atau seri-seri penting (Bintarto dan Hadisumarmo, 1984:12). Penyebaran penggunaan ruang yang sudah ada serta penyediaan ruang yang akan digunakan untuk macam-macam rencana kegiatan yang telah dirancang harus diperhatikan dalam analisis keruangan. Analisis spasial pada hakekatnya merupakan analisis lokasi yang mana terdiri dari tiga unsur geografi yaitu jarak (*distance*), kaitan (*interaction*), dan gerakan (*movement*) (Bintarto dan Hadisumarmo, 1984 : 74).

Agar penelitian ini dapat mencapai sasaran maka penulis mengambil 3 faktor yang pokok sebagai variabel penyebaran fasilitas pendidikan yaitu : penyebaran jumlah gedung sekolah, penyebaran penduduk usia sekolah, penyebaran jumlah murid.

#### **B. Jumlah gedung sekolah**

Sebagai lembaga pendidikan, Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sangat dipengaruhi jumlah penduduk usia sekolah, kesadaran pendidikan dari warga dan peran serta kebijakan pemerintah dalam menangani permasalahan ini. Jumlah penduduk usia sekolah yang besar akan membutuhkan sekolah sebagai lembaga yang besar pula. Jumlah antar fasilitas pendidikan tidak sama baik jumlah dan

persebarannya, karena tidak semua daerah mempunyai jumlah penduduk yang sama dan komposisi penduduk yang berbeda pula.

**a. Penyebaran Penduduk Usia Sekolah**

Suatu daerah apabila jumlah penduduknya besar dengan struktur penduduk termasuk muda, maka menggambarkan bahwa daerah tersebut cenderung jumlah usia sekolah lebih besar. Penduduk usia sekolah yang banyak maka diperlukan sekolah dasar dan menengah sebagai lembaga pendidikan.

**b. Jumlah Murid**

Imbangan guru dan jumlah murid yang ideal di peroleh dengan menghitung perbandingan : 1 ruang kelas dan 1 orang guru mengajar maksimum 40 murid. Apa bila jumlah murid lebih dari standart tersebut maka kebutuhan dalam proses belajar mengajar yang baik kurang terpenuhi.

R.Bintarto dan Surastopo (1977) menyebutkan bahwa ketidakpuasan orang membicarakan pola pemukiman (*Settlement*) secara deskriptif menimbulkan gagasan untuk membicarakan secara kuantitatif. Pola pemukiman yang dikatakan seragam (*uniform*), random, mengelompok (*Clusterea*) dan lain sebagainya dapat diberi ukuran yang bersifat kuantitatif. Dengan cara demikian ini perbandingan antara pola pemukiman dapat dilakukan dengan baik, bukan saja dari segi waktu tetapi juga dalam segi ruang (*space*). Pendekatan demikian disebut analisa tetangga terdekat (*Nearest-neighbour analysis*). Analisa seperti ini membutuhkan data tentang jarak antara satu pemukiman tetangga terdekat ini dapat pula digunakan sebagai menilai sebuah titik dalam ruang. Meskipun demikian analisa tetangga terdekat ini dapat pula digunakan sebagai menilai pola penyebaran fenomena lain seperti pola penyebaran tanah longsor, pola penyebaran puskesmas, sumber-sumber air dan lain sebagainya.

### **C. Zonasi**

Pengertian dari zonasi adalah sebagai pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan ( Kamus Besar Bahasa Indonesia ). sistem zonasi semua – khususnya sekolah negeri – disiapkan untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu secara merata bagi warga anggota masyarakat pada suatu areal atau kawasan tertentu sehingga anak-“anak terbaik” tidak perlu mencari “sekolah terbaik” yang lokasinya jauh dari tempat tinggalnya. Sistem Zonasi PPDB ini ternyata memberi implikasi pada perlunya penyiapan sekolah yang sama dan setara mutunya dengan sekolah yang selama ini dianggap sekolah unggul atau sekolah favorit.

#### **1.5.2 Penelitian Sebelumnya**

Mukmin Al Kahfi dan Dyah Widiyastuti ( 2017 ), dalam penelitiannya yang berjudul *“Kajian Ketersediaan dan Pola Distribusi Fasilitas Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Sederajat di Kabupaten Karanganyar”* bertujuan untuk mengidentifikasi ketersediaan fasilitas Pendidikan SMA/Sederajat di Kabupaten Karanganyar dan mengidentifikasi pola distribusi fasilitas Pendidikan SMA/ sederajat di Kabupaten Karanganyar serta Mengidentifikasi kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan SMA/ sederajat di Kabupaten Karanganyar. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang di dapat dari instansi terkait. Analisa dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Kemudian, hasil dari penelitian ini adalah 1) Ketersediaan fasilitas Pendidikan tingkat SMA/ sederajat menunjukkan hanya Kecamatan Karanganyar yang memenuhi standar. 2) Jangkauan spasial fasilitas pendidikan tingkat SMA/ sederajat di Kabupaten Karanganyar terletak pada tipologi sedang yang menunjukkan bahwa jangkauan spasial pendidikan SMA/ sederajat di Kabupaten Karanganyar belum mencapai seluruh wilayah permukiman yang ada. 3) Berdasarkan jenis pendidikannya persentase

kelengkapan sarana prasarana pendidikan SMA, SMK dan MA adalah 90%, 80% dan 89%.

Ahmad Amirul Azis ( 2018 ), dalam penelitian yang berjudul “*Analisis Pemenuhan Fasilitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) Menggunakan Sistem Informasi Geografi ( SIG ) di Kabupaten Rembang*” berujuan untuk mengkaji pola sebaran fasilitas pendidikan sekolah menengah pertama ( SMP ) di Kabupaten Rembang dan mengkaji angka partisipasi kasar ( APK ) masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas pendidikan SMP Negeri di Kabupaten Rembang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang di dapat dari instansi terkait dan melalui system informasi geografi ( sig ). Analisa dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Kemudian, hasil akhir dari penelitian ini adalah 1) Nilai pola sebaran gedung sekolah menengah pertama ( SMP ) mempunyai nilai  $T = 0,867$ . Nilai T tersebut mendekati angka 1, sehingga bias dikatakan pola sebaran gedung sekolah SMP di daerah penelitian adalah acak (random). 2) Nilai angka partisipasi kasar ( APK ) masyarakat Kabupaten Rembang sejumlah 64,6%. Angka partisipasi kasar ( APK ) tertinggi terdapat di Kecamatan Pancur sebesar 90%, sementara itu nilai angka partisipasi kasar ( APK ) terendah terdapat di Kecamatan Sedan sebesar 31,8%.

Kemudian, agar lebih mudah untuk difahami telaah mengenai penelitian sebelumnya dapat disajikan dalam bentuk tabel, sebagaimana tersaji dalam tabel 1.1 seperti dibawah ini :

Tabel 1.1 Ringkasan Penelitian Sebelumnya

Nama Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
Mukmin Al Kahfi & Dyah	Kajian Ketersediaan dan Pola Distribusi	1. Mengidentifikasi ketersediaan fasilitas Pendidikan	Deskriptif Kuantitatif	1. Ketersediaan fasilitas pendidikan tingkat SMA



Widiyastuti (	Fasilitas Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Sederajat di Kabupaten Karanganyar	<p>SMA /sederajat di Kabupaten Karanganyar.</p> <p>2. Mengidentifikasi pola distribusi fasilitas Pendidikan SMA/sederajat di Kabupaten Karanganyar.</p> <p>3. Mengidentifikasi kelengkapan saran dan prasarana Pendidikan SMA/sederajat di Kabupaten Karanganyar.</p>		<p>menunjukkan hanya Kecamatan Karanganyar yang memenuhi standar.</p> <p>2. Jangkauan spasial fasilitas pendidikan SMA/sederajat di Kabupaten Karanganyar terletak pada tipologi sedang yang menunjukkan bahwa jangkauan spasial pendidikan SMA/ sederajat di Kabupaten Karanganyar belum mencapai seluruh wilayah</p>
------------------	---	---	--	--

				<p>permukiman yang ada.</p> <p>3. Berdasarkan jenis pendidikannya persentase kelengkapan sarana prasarana pendidikan SMA, SMK dan MA adalah 90%, 80% dan 89%.</p>
--	--	--	--	---

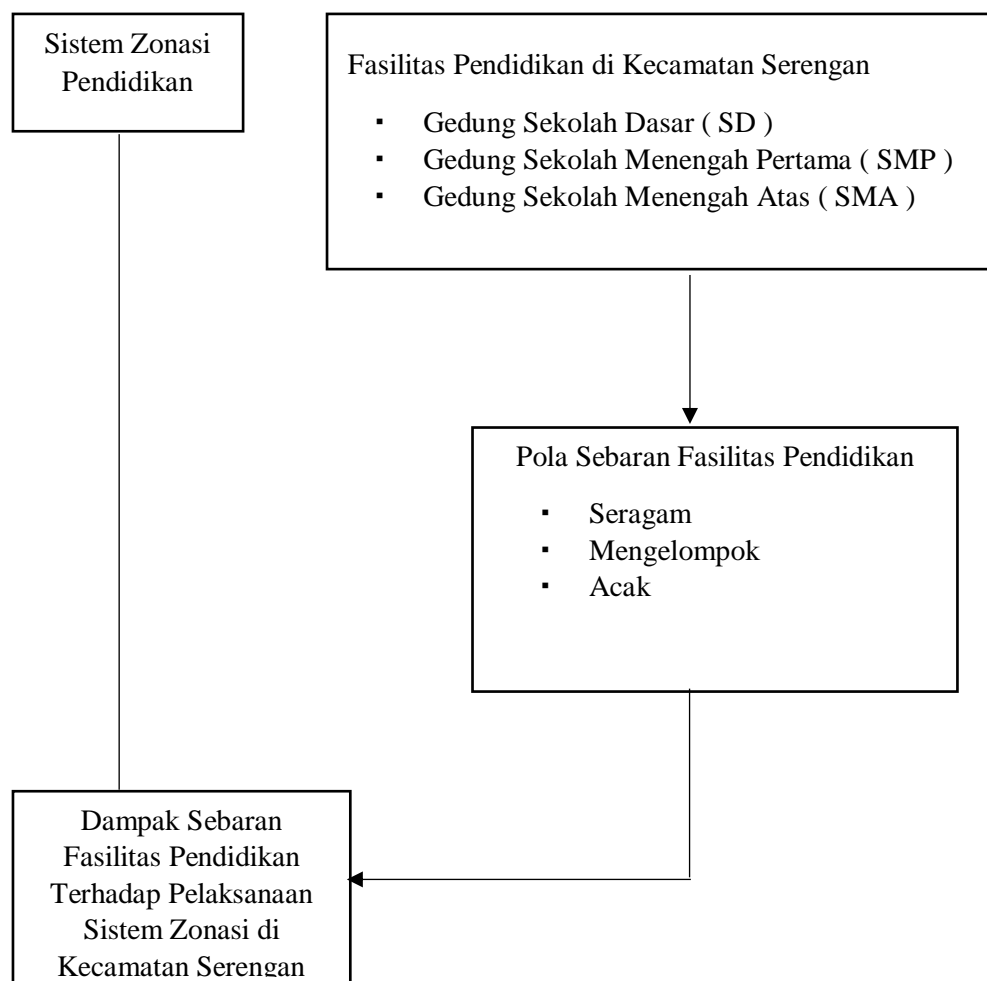
### 1.6 Kerangka Penelitian

Penelitian ini berangkat dari penerapan sistem zonasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yang sudah berjalan selama kurang lebih empat tahun dirasa belum sesuai dengan tujuannya. Sistem zonasi dapat berjalan maksimal apabila fasilitas pendidikan yang tersedia dalam satu wilayah sudah tersebar secara merata.

Penelitian ini akan dilaksanakan di salah satu wilayah administrasi Kecamatan yang ada di suatu wilayah Kecamatan ini memiliki total fasilitas pendidikan sejumlah 16 sekolah, yang terdiri atas 14 sekolah dasar dan 2 sekolah menengah pertama. Kecamatan tersebut memiliki jumlah fasilitas pendidikan yang paling rendah jika dibandingkan dengan Kecamatan lain yang berada di wilayah administrasi Kota Surakarta.

Pengaruh sebaran fasilitas pendidikan terhadap sistem zonasi dikaji dengan memperhatikan keterkaitan antara keberjalanan sistem zonasi dengan pola sebaran fasilitas pendidikan. Parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat pengaruh yaitu keberjalanan sistem zonasi dan pola sebaran fasilitas pendidikan. Penentuan

pola sebaran fasilitas pendidikan menggunakan data sekunder sedangkan untuk penentuan keberjalanan sistem zonasi menggunakan kuesioner. Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif. Kemudian untuk menganalisis dan menentukan pengaruh sebaran fasilitas pendidikan terhadap sistem zonasi menggunakan deskripsi kualitatif. Data dianalisis untuk mendapatkan tingkat sebaran fasilitas pendidikan dan pengaruh sebaran fasilitas terhadap sistem zonasi. Selanjutnya data akan diolah juga menggunakan Sistem Informasi Geospasial (SIG). Dari pengolahan ini akan menghasilkan produk berupa peta sebaran fasilitas pendidikan dan peta pengaruh sebaran fasilitas terhadap sistem zonasi. Untuk mengetahui gambaran dari alur kerangka penelitian maka dapat dilihat pada gambar 1 berikut.



Gambar 1.1 Kerangka Penelitian

## 1.7 Batasan Oprasional

**Analisis** adalah uraian atau usaha mengetahui arti suatu keadaan. Data atau bahan keterangan mengenai suatu keadaan diurai dan diselidiki hubungannya satu sama lain (Muehrche, 1978).

**Desa** adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain (Bintarto, 1977)

**Fasilitas Pendidikan** adalah keseluruhan dari sarana dan prasarana (gedung, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium) yang digunakan untuk menunjang keterlaksanaan pembelajaran dan penunjang kegiatan pendidikan (Jayadinata, 1986)

**Pendidikan** adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, keperibadian, kecerdasan, sikap sosial, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.(SISDIKNAS, 2001 dalam Lilik Sri, 2005).

**Pendidikan Dasar** adalah pendidikan sembilan tahun, yang terdiri atas program pendidikan enam tahun di SD dan program pendidikan tiga tahun di SMP (Dinas Pendidikan Nasional, 2002).

**Pendidikan Formal** adalah pendidikan yang di sekolah, yang teratur, sistematis, mempunyai jenjang dan yang di bagi dalam waktu-waktu tertentu yang berlangsung dari Taman Kanak-Kanak sampai perguruan tinggi (Dinas Pendidikan Nasional, 2002).

**Peta** adalah gambaran konvensional dan selektif yang di perkecil, dibuat pada bidang datar meliputi kenampakan-kenampakan permukaan bumi, maupun data yang ada kaitannya dengan permukaan bumi (Agus Dwi Martono,1998)

**Zonasi** adalah sebagai pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan ( Kamus Besar Bahasa Indonesia ).